

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 12, NO. 2, DESEMBER 2021

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

DAMPAK PENERAPAN RENCANA AKSI APEC PADA LIMA INDIKATOR *EASE OF DOING BUSINESS* TERHADAP PENDIRIAN USAHA DI KAWASAN APEC

Elsya Yunita dan Nining Indroyono Soesilo

ANALISIS KOINTEGRASI KETERBUKAAN PERDAGANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Sri Amanda Fitriani, Dedi Budiman Hakim, dan Widyastutik

MENGUKUR PERSISTENSI INFLASI: STUDI KOMPARASI DELAPAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Setyo Tri Wahyudi, M. Khusaini, dan Rihana Sofie Nabella

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI DI KOTA YOGYAKARTA

Iwan Hermawan, Izzaty, Eka Budiyanti, Rafika Sari, Yuni Sudarwati, dan Mohammad Teja

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN *E-BUDGETING* DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI PEMERINTAH ACEH

Almuttaqin, Nunung Kusnadi, dan Widyastutik

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN REALISASI RENCANA TATA RUANG KEK. GARUT KOTA DI KAB. GARUT: STUDI ANALISIS KEBIJAKAN.

Lukmanul Hakim, Emma Rochima, dan Santhy Wyantuti

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 12, NO. 2, DESEMBER 2021

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v-vii
Abstrak	ix-xvi
DAMPAK PENERAPAN RENCANA AKSI APEC PADA LIMA INDIKATOR EASE OF DOING BUSINESS TERHADAP PENDIRIAN USAHA DI KAWASAN APEC	
<i>Elsya Yunita dan Nining Indroyono Soesilo</i>	89-101
ANALISIS KOINTEGRASI KETERBUKAAN PERDAGANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA	
<i>Sri Amanda Fitriani, Dedi Budiman Hakim, dan Widyastutik</i>	103-116
MENGUKUR PERSISTENSI INFLASI: STUDI KOMPARASI DELAPAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR	
<i>Setyo Tri Wahyudi, M. Khusaini, dan Rihana Sofie Nabella</i>	117-129
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI DI KOTA YOGYAKARTA	
<i>Iwan Hermawan, Izzaty, Eka Budiyantri, Rafika Sari, Yuni Sudarwati, dan Mohammad Teja</i>	131-145
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN E-BUDGETING DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH ACEH	
<i>Almuttaqin, Nunung Kusnadi, dan Widyastutik</i>	147-161
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN REALISASI RENCANA TATA RUANG KEC. GARUT KOTA DI KAB. GARUT: STUDI ANALISIS KEBIJAKAN	
<i>Lukmanul Hakim, Emma Rochima, dan Santhy Wyantuti</i>	163-175

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan ridanya Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik (JEKP) Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah terakreditasi Sinta-2 kembali terbit. JEKP edisi ini berisi enam tulisan yang membahas hasil penelitian terhadap sejumlah isu ekonomi dan kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat. Keenam tulisan tersebut mengulas isu tentang perbaikan regulasi usaha, keterbukaan perdagangan, inflasi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *e-Budgeting*, dan kebijakan rencana tata ruang.

Jurnal edisi ini diawali dengan tulisan berjudul “Dampak Penerapan Rencana Aksi APEC pada Lima Indikator *Ease of Doing Business* terhadap Pendirian Usaha di Kawasan APEC” yang ditulis oleh Elsy Yunita dan Nining Indroyono Soesilo. Penulis membahas isu penetapan Rencana Aksi Kemudahan Berusaha APEC sebagai bentuk intervensi untuk mendorong perbaikan regulasi usaha di kawasan negara anggotanya. Penelitian ini menguji bagaimana dampak perbaikan regulasi usaha pada kelima indikator kemudahan berusaha terhadap pendirian usaha di kawasan APEC, dalam kondisi adanya intervensi berupa penerapan Rencana Aksi APEC. Menggunakan kombinasi *Fixed Effects Model*, *Random-Effects Model*, dan *Random Effect-instrumental variable* pada data panel 15 ekonomi anggota APEC tahun 2006-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perbaikan skor pada lima indikator kemudahan berusaha setelah adanya penerapan Rencana Aksi APEC. Perbaikan regulasi pada indikator memulai usaha memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pendirian usaha di kawasan APEC, di mana peningkatan jumlah pendirian usaha di kawasan APEC dipengaruhi secara signifikan oleh penurunan jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan memulai usaha. Adapun empat indikator kemudahan berusaha lainnya menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap pendirian usaha. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar anggota APEC merancang kebijakan yang fokus pada penyediaan layanan perizinan memulai usaha yang mudah, murah, dan cepat. Misalnya dengan mengimplementasikan layanan “*one-stop shops*” serta mengembangkan layanan berbasis elektronik untuk mempercepat proses perizinan dan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan.

Tulisan kedua berjudul “Analisis Kointegrasi Keterbukaan Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” ditulis oleh Sri Amanda Fitriani, Dedi Budiman Hakim, dan Widyastutik. Ketiga penulis menyoroti fenomena bahwa setiap negara saat ini melakukan keterbukaan perdagangan untuk menunjang kebutuhan domestik dan pertumbuhan ekonomi. Studi empiris hubungan keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan beberapa indikator keterbukaan perdagangan. Jenis data penelitian adalah data sekunder dalam deret waktu tahunan dari tahun 1980-2019. Penelitian ini menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang tetapi negatif dalam jangka pendek dari seluruh indikator keterbukaan perdagangan yang digunakan (ekspor ditambah impor dibagi PDB, ekspor dibagi PDB, dan impor dibagi PDB). Dalam jangka panjang terdapat hubungan yang negatif antara *Foreign Direct Investment* (FDI) dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan positif. Untuk modal manusia memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang, tetapi tidak signifikan dalam jangka pendek. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kinerja perdagangan dalam jangka pendek dengan mendorong sektor riil dalam negeri, peningkatan pengawasan dan kerja sama dari seluruh *stakeholder* yang terkait untuk mendukung FDI, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi.

Tulisan ketiga ditulis oleh Setyo Tri Wahyudi, M. Khusaini, dan Rihana Sofie Nabella berjudul “Mengukur Persistensi Inflasi: Studi Komparasi Delapan Kabupaten/Kota di Jawa Timur”. Tulisan ini berusaha mengukur pergerakan inflasi yang menjadi salah satu variabel penting di dalam ekonomi. Menggunakan data inflasi tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur, penelitian bertujuan untuk mengukur dan menganalisis penyebab persistensi inflasi di delapan kabupaten/kota yang berada di Jawa Timur. Persistensi inflasi menunjukkan kecepatan tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat ekuilibriumnya setelah adanya suatu *shock*. Untuk mengukur derajat persistensi inflasi tersebut maka digunakan Model *Univariate Autoregressive* (AR). Berdasarkan hasil

pengujian diperoleh temuan pertama bahwa inflasi di delapan kabupaten/kota di Jawa Timur cenderung berfluktuasi sepanjang periode penelitian. Inflasi tertinggi berada di Kota Probolinggo, sedangkan yang terendah berada di Kota Madiun. Komoditas penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok bahan makanan, contohnya telur ayam ras, beras, ayam ras, tomat sayur, bawang merah, dan daging sapi. Hasil temuan kedua menunjukkan bahwa derajat persistensi inflasi di delapan kabupaten/kota yang berada di Jawa Timur masih terbilang tinggi sehingga memerlukan perhatian dari regulator. Selain itu, persistensi inflasi tersebut disebabkan oleh tingginya ekspektasi inflasi atau mengarah ke *forward looking*. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah perlu menyusun strategi yang terukur dalam mengendalikan inflasi agar stabil, seperti mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Tulisan keempat berjudul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta” ditulis oleh Iwan Hermawan, Izzaty, Eka Budiyantri, Rafika Sari, Yuni Sudarwati, dan Mohammad Teja. Tulisan ini mengangkat isu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengakses sebagian pangannya. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan BPNT, khususnya di Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah percontohan BPNT di Indonesia. Untuk menjawab tujuan penelitian maka digunakan pendekatan kualitatif dengan dilengkapi data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari kuesioner berdasarkan perspektif e-Warong dan wawancara mendalam dengan narasumber dari Kementerian Sosial, akademisi, dinas sosial, dan lainnya. Sedangkan data sekunder berasal dari publikasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati kebijakan publik, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan Perum Bulog. Selanjutnya secara khusus pendekatan *Importance-Performance Analysis* (IPA) diaplikasikan guna mengukur karakteristik efektivitas dari pelaksanaan BPNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT di Kota Yogyakarta secara umum berjalan efektif namun dengan catatan jika dilihat berdasarkan indikator prinsip 6 T (enam tepat). Dimensi administrasi menjadi dimensi yang belum berperforma baik dibandingkan dimensi lainnya. Apalagi dimensi-dimensi lain yang sudah efektif ternyata masih berpotensi menurun kinerjanya karena berbagai faktor berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan. Oleh sebab itu, beberapa rekomendasi kebijakan disarankan, yaitu menyempurnakan pasokan, memperbaiki infrastruktur, dan menyempurnakan mekanisme pendataan. Selain itu, saran lainnya adalah menyempurnakan BPNT sesuai karakteristik masyarakat dan wilayah serta meningkatkan intensitas keterlibatan dan kinerja Bulog untuk mendukung BPNT dan urusan pangan nasional.

Tulisan kelima ditulis oleh Almuttaqin, Nunung Kusnadi, dan Widyastutik dengan judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan *E-Budgeting* dalam Mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Aceh”. Tulisan ini dilatarbelakangi fenomena pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang hampir satu dekade sebelumnya selalu terlambat dan akhirnya dapat dilakukan tepat waktu pada tahun 2020 semenjak *e-budgeting* diaplikasikan. Namun demikian, Indeks Reformasi Birokrasi yang direalisasikan ternyata tidak meningkat dari tahun lalu, sementara Indeks Keterbukaan Informasi Publik bahkan mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *e-budgeting*, khususnya di Provinsi Aceh. Populasi penelitian ini merupakan 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai unit analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner *online* dan wawancara kepada 67 responden melalui *google form*. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* pada SKPA menunjukkan kinerja yang bagus. Penerapan *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh mencapai nilai tertinggi pada prinsip efektif dan nilai terendah pada prinsip transparan. Di sisi lain, berdasarkan hasil pendekatan regresi linier berganda menunjukkan bahwa dukungan atasan langsung dan jumlah operator *e-budgeting* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *e-budgeting*. Selain itu, pendidikan formal, pengalaman, pelatihan, dan keseimbangan penghasilan dengan beban kerja juga memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan.

Tulisan terakhir berjudul “Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan” ditulis oleh Lukmanul Hakim, Emma Rochima, dan Santhy Wyantuti. Ketiga penulis menyoroti isu peraturan daerah terkait dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan payung hukum dalam pembangunan suatu daerah namun kadangkala justru tidak sinkron dengan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan kesenjangan antara Kebijakan RTRW Kabupaten Garut dengan realisasinya, khususnya terkait Kawasan Peruntukan Industri untuk industri penyamakan kulit Sukaregang, Kecamatan Garut Kota. Metode penelitian kebijakan (*policy research*) digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara kebijakan dan realisasi. Caranya dengan sinkronisasi antara Kebijakan RTRW dengan kondisi di lapangan serta peraturan perundang-undangan terkait yang dikombinasikan dengan pendekatan *Importance Performance Analysis* (IPA). Berdasarkan hasil

analisis bahwa arahan pola ruang RTRW Kabupaten Garut terkait kawasan peruntukan industri di Kecamatan Garut Kota ternyata belum didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan serta kondisi di lapangan, sehingga terjadi ketidaksinkronan. Demikian pula dengan arahan kebijakan rencana tata ruang dengan kondisi aktual di lapangan terjadi kesenjangan sebesar 42 persen. Oleh sebab itu, agar kebijakan rencana tata ruang dapat berjalan efektif maka Perda RTRW yang ada perlu dilakukan peninjauan kembali untuk direvisi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait serta kondisi aktual di lapangan.

Besar harapan kami semoga beragam isu yang dibahas dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah keilmuan, khususnya bidang ekonomi dan kebijakan publik bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh mitra bestari dan redaktur pelaksana yang telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan perbaikan, baik secara substansial maupun redaksional. Ucapan terima kasih juga tidak lupa disampaikan kepada seluruh jajaran sekretariat dan tata usaha yang telah mendukung suksesnya penerbitan jurnal edisi ini. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah mendukung secara kedinasan agar JEKP selalu terbit secara berkelanjutan.

Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, 30 Desember 2021

Hormat kami,
Dewan Redaksi JEKP

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 12, NO. 2, DESEMBER 2021

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

Elsya Yunita (Universitas Indonesia) dan Nining Indroyono Soesilo (Universitas Indonesia)

DAMPAK PENERAPAN RENCANA AKSI APEC PADA LIMA INDIKATOR *EASE OF DOING BUSINESS* TERHADAP PENDIRIAN USAHA DI KAWASAN APEC

JEKP, Vol. 12, No. 2, Desember 2021, hal. 89-101

Abstrak

Regulasi usaha yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan aktivitas usaha. Pada tahun 2009, APEC menetapkan Rencana Aksi Kemudahan Berusaha APEC (Rencana Aksi APEC) sebagai bentuk intervensi untuk mendorong perbaikan regulasi usaha di kawasan anggotanya. Terdapat lima indikator kemudahan berusaha yang menjadi prioritas perbaikan dalam Rencana Aksi APEC, yaitu memulai usaha, perizinan terkait mendirikan bangunan, akses perkreditan, perdagangan lintas negara, dan penegakan kontrak. Penelitian ini menguji bagaimana dampak perbaikan regulasi usaha pada kelima indikator tersebut terhadap pendirian usaha di kawasan APEC, dalam kondisi adanya intervensi berupa penerapan Rencana Aksi APEC. Menggunakan kombinasi *fixed effects model*, *random-effects model*, dan *random effect – instrumental variable* pada data panel 15 ekonomi anggota APEC tahun 2006-2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perbaikan skor pada lima indikator kemudahan berusaha setelah adanya penerapan Rencana Aksi APEC. Perbaikan regulasi pada indikator memulai usaha memiliki pengaruh paling signifikan terhadap pendirian usaha di kawasan APEC, di mana peningkatan jumlah pendirian usaha di kawasan APEC dipengaruhi secara signifikan oleh penurunan jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan memulai usaha. Adapun empat indikator kemudahan berusaha lainnya menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap pendirian usaha. Dari hasil penelitian, disarankan agar anggota APEC merancang kebijakan yang memfokuskan pada penyediaan layanan perizinan memulai usaha yang mudah, murah dan cepat. Misalnya dengan mengimplementasikan layanan “*one-stop shops*” serta mengembangkan layanan berbasis elektronik untuk mempercepat proses perizinan dan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan. Kata kunci: APEC, kemudahan berusaha, pendirian usaha, regulasi, data panel

Sri Amanda Fitriani (Institut Pertanian Bogor), Dedi Budiman Hakim (Institut Pertanian Bogor), dan Widyastutik (Institut Pertanian Bogor)

ANALISIS KOINTEGRASI KETERBUKAAN PERDAGANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

JEKP, Vol. 12, No. 2, Desember 2021, hal. 103-116

Abstrak

Arus globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi hampir seluruh negara di dunia. Setiap negara saat ini melakukan keterbukaan perdagangan untuk menunjang kebutuhan domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pergerakan rasio keterbukaan perdagangan Indonesia cenderung menurun dan rendah, tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonominya. Studi empiris menganalisis hubungan keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang telah dilakukan memiliki hasil penelitian yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan beberapa indikator keterbukaan perdagangan. Jenis data penelitian adalah data sekunder dalam deret waktu tahunan (*time series*) dari tahun 1980 sampai tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang tetapi negatif dalam jangka pendek dari seluruh indikator keterbukaan perdagangan yang digunakan (ekspor ditambah impor dibagi PDB, ekspor dibagi PDB, dan impor dibagi PDB). Dalam jangka panjang terdapat hubungan yang negatif antara *Foreign Direct Investment* (FDI) dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan positif. Untuk modal manusia memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang, tetapi tidak signifikan dalam jangka pendek. Rekomendasi dari penelitian ini, perlu adanya peningkatan kinerja perdagangan dalam jangka pendek dengan menghidupkan sektor riil dalam negeri, peningkatan pengawasan serta kerja sama dari seluruh *stakeholders* yang terkait dalam mendukung FDI, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi.

Kata kunci: keterbukaan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, ARDL

Setyo Tri Wahyudi (Universitas Brawijaya), M. Khusaini (Universitas Brawijaya), dan Rihana Sofie Nabella (Universitas Brawijaya)

MENGUKUR PERSISTENSI INFLASI: STUDI KOMPARASI DELAPAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

JEKP, Vol. 12, No. 2, Desember 2021, hal. 117-129

Abstrak

Inflasi menjadi salah satu variabel penting dalam ekonomi. Setiap pergerakan inflasi akan menyebabkan beberapa perubahan terhadap variabel fundamental ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Oleh karena itu, inflasi menjadi variabel yang seringkali diamati dan diuji, baik secara teoritis maupun empiris. Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh angka inflasi yang stabil dan kemudian akan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Menggunakan data inflasi tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur, penelitian ini bertujuan untuk mengukur persistensi inflasi di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur. Persistensi inflasi menunjukkan kecepatan tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat ekuilibriumnya setelah adanya suatu *shock*. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis penyebab persistensi di 8 kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk mengukur derajat persistensi inflasi, penelitian ini menggunakan model *univariate autoregressive* (AR). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh temuan bahwa (1) inflasi di 8 kabupaten/kota di Jawa Timur cenderung berfluktuasi sepanjang periode penelitian ini. Inflasi tertinggi berada di Kota Probolinggo, sedangkan yang terendah adalah Kota Madiun. Komoditas penyumbang inflasi terbesar dari kelompok bahan makanan, contohnya telur ayam ras, beras, ayam ras, tomat sayur, bawang merah, dan daging sapi. Kemudian (2) hasil yang diperoleh adalah derajat persistensi inflasi di 8 kabupaten/kota di Jawa Timur masih terbilang tinggi, sehingga memerlukan perhatian dari regulator. Selain itu, persistensi inflasi ini disebabkan oleh tinggi ekspektasi inflasi atau mengarah ke *forward looking*. Berdasarkan temuan, pemerintah perlu menyusun strategi yang terukur dalam mengendalikan inflasi supaya stabil, seperti mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Keyword: inflasi, persistensi, *autoregressive*

Iwan Hermawan, Izzaty, Eka Budiyantri, Rafika Sari, Yuni Sudarwati, dan Mohammad Teja (Badan Keahlian-Setjen DPR RI)

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI DI KOTA YOGYAKARTA

JEKP, Vol. 12, No. 2, Desember 2021, hal. 131-145

Abstrak

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mengakses sebagian pangannya. Namun sayang, berbagai kendala dan tantangan masih jamak ditemukan dalam pelaksanaannya sehingga berpotensi mengurangi manfaat utuh dari adanya BPNT. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan BPNT, khususnya di Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah percontohan BPNT di Indonesia. Untuk menjawabnya, digunakan pendekatan kualitatif dengan dilengkapi data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari kuesioner berdasarkan perspektif e-Warong dan juga wawancara mendalam dengan narasumber dari Kementerian Sosial, akademisi, dinas sosial, dan lainnya. Sedangkan data sekunder berasal dari publikasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati kebijakan publik, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan Perum Bulog. Selanjutnya secara khusus pendekatan *Importance-Performance Analysis* (IPA) diaplikasikan guna mengukur karakteristik efektivitas dari pelaksanaan BPNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT di Kota Yogyakarta secara umum berjalan efektif namun dengan catatan jika dilihat berdasarkan indikator prinsip 6 T. Dimensi administrasi menjadi dimensi yang belum berperforma baik dibandingkan dimensi lainnya. Apalagi dimensi-dimensi lain yang sudah efektif ternyata masih berpotensi menurun kinerjanya karena berbagai faktor berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan. Berdasarkan temuan tersebut, berbagai rekomendasi kebijakan disarankan, antara lain penyempurnaan pasokan, perbaikan infrastruktur, dan menyempurnakan mekanisme pendataan. Selain itu, saran lainnya adalah menyempurnakan BPNT sesuai karakteristik masyarakat dan wilayah serta meningkatkan intensitas keterlibatan dan kinerja Bulog untuk mendukung BPNT dan urusan pangan nasional.

Kata kunci: Bantuan Pangan Nontunai, efektivitas, pangan, e-Warong, *Importance-Performance Analysis*

Almuttaqin (Institut Pertanian Bogor), **Nunung Kusnadi** (Institut Pertanian Bogor), dan **Widyastutik** (Institut Pertanian Bogor)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN *E-BUDGETING* DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI PEMERINTAH ACEH

JEKP, Vol. 12, No. 2, Desember 2021, hal. 147-161

Abstrak

Otonomi daerah menuntut reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pada era digitalisasi industri 4.0 saat ini, perkembangan sistem informasi dapat dirancang sebagai media pendukung, seperti *e-Budgeting* yang digunakan oleh Pemerintah Aceh. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang hampir satu dekade sebelumnya selalu terlambat, akhirnya dapat dilakukan tepat waktu pada tahun 2020, dimana *e-Budgeting* berperan penting terhadap pencapaian tersebut. Namun demikian, Indeks Reformasi Birokrasi yang direalisasikan tidak meningkat dari tahun lalu, sementara Indeks Keterbukaan Informasi Publik bahkan mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *e-Budgeting*. Populasi penelitian ini merupakan 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai unit analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner online dan wawancara kepada 67 responden melalui *google form*. Analisis deskripsi terhadap penerapan *e-Budgeting* pada SKPA mengindikasikan kinerja yang bagus. Penerapan *e-Budgeting* dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh mencapai nilai tertinggi pada prinsip efektif dan terendah pada prinsip transparan. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan pada tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5$ persen). Hasil uji serempak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,042 sehingga disimpulkan bahwa setidaknya ada satu variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,049 dengan nilai konstanta sebesar 3,418 dan koefisien determinasi sebesar 0,437. Hasil penelitian membuktikan bahwa dukungan atasan langsung dan jumlah operator *e-Budgeting* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *e-Budgeting*, sedangkan pendidikan formal, pengalaman, pelatihan, dan keseimbangan penghasilan dengan beban kerja juga berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Kata kunci: *e-Budgeting*, perencanaan, Pemerintah Aceh, sistem informasi, analisis regresi linier berganda

Lukmanul Hakim (Universitas Padjajaran), **Emma Rochima** (Universitas Padjajaran), dan **Santhy Wyantuti** (Universitas Padjajaran)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN REALISASI RENCANA TATA RUANG KEC. GARUT KOTA DI KAB. GARUT: STUDI ANALISIS KEBIJAKAN

JEKP, Vol. 11, No. 2, Desember 2020, hal. 163-175

Abstrak

Peraturan Daerah terkait Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan payung hukum dalam pembangunan suatu daerah, tetapi kebijakan tersebut terkadang tidak sinkron jika diterapkan di lapangan, sehingga muncul kesenjangan antara kebijakan rencana tata ruang dan realisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan kesenjangan antara Kebijakan RTRW Kabupaten Garut dengan realisasi, khususnya terkait KPI IPK Sukaregang, Kecamatan Garut Kota. Metode "penelitian kebijakan" (*policy research*) digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan sinkronisasi antara Kebijakan RTRW dengan kondisi di lapangan dan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang dikombinasi dengan pendekatan *Importance Performance Analysis (IPA)* untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara Kebijakan dan realisasi. Berdasarkan hasil analisis, arahan pola ruang RTRW Kabupaten Garut terkait Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Garut Kota belum didasarkan pada peraturan dan perundangan serta kondisi di lapangan, sehingga terjadi ketidaksinkronan dalam perencanaan. Demikian juga dengan arahan kebijakan rencana tata ruang dengan kondisi aktual di lapangan terjadi kesenjangan sebesar 42 persen. Agar kebijakan rencana tata ruang dapat berjalan efektif, maka Perda RTRW yang ada perlu dilakukan peninjauan kembali (PK) untuk selanjutnya dilakukan revisi yang didasarkan kepada peraturan dan perundangan yang terkait serta kondisi aktual di lapangan.

Kata kunci: kebijakan rencana tata ruang, industri penyamakan kulit, kesenjangan

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 12, NO. 2, DECEMBER 2020

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Elsya Yunita (The University of Indonesia) and Nining Indroyono Soesilo (The University of Indonesia)

THE IMPACT OF THE APEC'S ACTION PLAN ON FIVE INDICATORS OF EASE OF DOING BUSINESS ON FIRM CREATION IN THE APEC REGION

JEKP, Vol. 12, No. 2, December 2021, pp. 89-101

Abstract

Inefficient business regulation may hinder the growth of business activities. In 2009, APEC established the APEC Ease of Doing Business Action Plan (the APEC Action Plan) to promote business regulatory reforms in its member region. There are five indicators of ease of doing business identified as reform priorities in the APEC Action Plan, namely starting a business, dealing with construction permits, getting credit, trading across borders, and enforcing contracts. This study tested the impact of regulatory reforms on these five indicators on firm creation in the APEC region in the presence of the APEC Action Plan as an intervention. Using a combination of fixed effects model, random-effects model, and Random Effect-instrumental variable on the panel data of 15 APEC member economies over the 2006-2018 period, results show a better score improvement in the five indicators of ease of doing business after implementing the APEC Action Plan. Regulatory reforms on the starting a business indicator have the most significant impact on firm creation in the APEC region. Specifically, the increasing number of firm creation is strongly driven by the decreasing number of days required to obtain a license to start a business. The other four indicators show an insignificant relationship to the firm creation. APEC members are suggested to design policies that focus on providing licensing services to start a business that is easy, cheap, and fast. For example, by implementing "one-stop-shops" services and developing electronic-based services to speed up the licensing process and minimize costs.

Keywords: APEC, ease of doing business, firm creation, regulation, panel data

Sri Amanda Fitriani (IPB University), Dedi Budiman Hakim (IPB University), and Widyastutik (IPB University)

COINTEGRATION ANALYSIS OF TRADE OPENNESS AND ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

JEKP, Vol. 12, No. 2, December 2021, pp. 103-116

Abstract

The flow of globalization is a problem for almost all states in the world. Every country is currently conducting trade openness to support domestic needs and encourage economic growth. The trend of Indonesia's trade openness ratio which tends to decrease, it has not trend with Indonesia's economic growth. This study aims to analyze the relationship between trade openness and economic growth in Indonesia, both in the short and long term, using various trade openness indicators. The type of research data is secondary data in an annual time series from 1980 to 2019. The method used in this study is Autoregressive Distributed Lag (ARDL). All trade openness measure (exports plus imports, exports, and imports) used in this study show a positive and significant relationship between trade openness and economic growth in Indonesia over the long term but a negative relationship in the short term. For a long term, there has been a negative relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and economic growth in Indonesia; however, there is a positive relationship in the short term. Human capital has a long term positive relationship with economic growth in Indonesia, but it is not significant in the short term. This study suggests a need for an increase in trade performance in a short term by reviving the real domestic market, increasing monitoring and cooperation from all stakeholders involved in supporting FDI, and providing easy access for people who are less able to pursue higher education.

Keyword: trade openness, economic growth, ARDL

Setyo Tri Wahyudi (Brawijaya University), M. Khusaini (Brawijaya University), and Rihana Sofie Nabella (Brawijaya University)

MEASURING INFLATION PERSISTENCE: COMPARATION STUDY AMONG EIGHT CITIES IN EAST JAVA

JEKP, Vol. 12, No. 2, December 2021, pp. 117-129

Abstract

Inflation is becoming one of the critical variables in the economy. Any movement in inflation will cause some changes to fundamental economic variables, such as economic growth and unemployment. Therefore, inflation becomes a variable that is often observed and tested, both theoretically and empirically. Stable inflation is a prerequisite for sustainable economic growth, which ultimately benefits the improvement of people's well-being. Using city-level inflation data in East Java, this study aims to measure inflation's persistence at the city level in East Java. The persistence of inflation indicates the speed at which the inflation rate returns to its equilibrium level after a shock. This study will also analyze the causes of persistence in 8 cities in East Java. In this study, to measure the degree of inflationary persistence, the study used an autoregressive univariate (AR), model. The test results found that (1) inflation in 8 cities in East Java tended to fluctuate throughout the research period. The highest inflation occurred in Probolinggo City, while the lowest was in Madiun City. The most significant contributors to inflation are food groups, such as chicken eggs, rice, chicken breeds, vegetable tomatoes, shallots, and beef. Then (2) the result obtained is the degree of inflation persistence in 8 cities in East Java is still relatively high, so it requires attention from regulators. Moreover, the persistence of inflation is caused by high inflation expectations or leading to forward-looking. Based on the findings, the government needs to devise a measured strategy to control inflation to be stable, such as optimizing the Regional Inflation Control Team (TPID).

Keyword: inflation, persistence, autoregressive

Iwan Hermawan, Izzaty, Eka Budiyantri, Rafika Sari, Yuni Sudarwati, and Mohammad Teja (Expertise Body, Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia)

THE EFFECTIVENESS OF NON-CASH FOOD ASSISTANCE PROGRAM IN YOGYAKARTA CITY

JEKP, Vol. 12, No. 2, December 2021, pp. 131-145

Abstract

Non-Cash Food Assistance (BPNT) aims to help the poor in accessing some of their food. Unfortunately, various obstacles and challenges are still found in the implementation that can potentially reduce the full benefits of BPNT. This research aims to analyze the effectiveness of BPNT implementation in Yogyakarta City as a pilot area. A qualitative approach is used to answer it, supplemented by a variety of primary and secondary data. The primary data comes from a questionnaire based on an e-Warong perspective and in-depth interviews with relevant stakeholders, namely Ministry of Social Affairs, academics, social service, and other. Secondary data comes from the publication of the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, Non-Governmental Institutions observing public policy, Statistics Indonesia, the Ministry of Social Affairs, the National Logistics Agency, and other. The Importance Performance Analysis (IPA) approach is specifically applied to measure the effectiveness characteristics of the BPNT implementation. The results showed that the implementation of BPNT in Yogyakarta City was generally effective but with a note when viewed from 6 accuracy indicators. The administrative dimension has not performed better than the others. Moreover, according to the interviews, the established dimensions still have a chance to decrease its performance due to various factors. Based on that finding, the government needs to improve food supply, infrastructure, and data collection mechanism. In addition, other suggestions are to improve BPNT based on beneficiary and region, and to increase the National Logistics Agency's involvement and performance to support BPNT and national food affairs.

Keywords: Non-Cash Food Assistance, effectiveness, food, e-Warong, Importance Performance Analysis

Almuttaqin (IPB University), Nunung Kusnadi (IPB University), and Widyastutik (IPB University)

FACTORS THAT INFLUENCE E-BUDGETING IMPLEMENTATION TO ACHIEVE A GOOD GOVERNANCE IN ACEH LOCAL GOVERNMENT

JEKP, Vol. 12, No. 2, December 2021, pp. 147-161

Abstract

Regional autonomy requires a bureaucratic reform in financial management by implementing good governance principles to improve government performance and accelerate regional development goals. During the 4.0 digitalization industrial era nowadays, information systems can be designed as supporting media, such as e-Budgeting used by Aceh Local Government. The ratification of Aceh Local Budget, which was always late almost a decade earlier, could finally be applied in 2020, where e-Budgeting has an important role in this achievement. However, the Bureaucratic Reform Index Realization did not increase compared to last year, even the Transparency Index decreased. This study is aimed to determine some factors that influence e-Budgeting implementation. The study population was 47 Aceh Local Government Agencies (SKPA) as analysis units. Furthermore, the technique of data collection used online questionnaires and interviews with 67 respondents via google form. Descriptive analysis toward the implementation of e-Budgeting in SKPA indicates good performance. Aceh Government e-Budgeting implementation achieves the highest value on effectiveness principle and the lowest on transparency principle. The technique of multiple linear regression analysis was used at 0.05 significance level. Results of simultaneous test show a significance value of 0.042; thus, it can be concluded that at least one independent variable affects the dependent variable. Moreover, the partial test results also show a significance value of 0.049 with a constant value of 3.418, and the coefficient of determination is 0.437. Finally, this study proves that direct supervisor support and the number of operators positively and significantly affect implementing e-Budgeting. Meanwhile, other variables, including formal education, experience, training, and income-work balancing, also have a positive impact but are insignificant.

Keywords: e-Budgeting, planning, Aceh Local Government, information system, multiple linear regression analysis

Lukmanul Hakim (Padjajaran University), Emma Rochima (Padjajaran University), and Santhy Wyantuti (Padjajaran University)

POLICY IMPLEMENTATION AND REALIZATION OF SPATIAL PLANNING IN GARUT KOTA DISTRICT IN GARUT REGENCY: POLICY ANALYSIS STUDY

JEKP, Vol. 12, No. 2, December 2021, pp. 163-175

Abstract

Regional regulations related to the RTRW (Regional Spatial Planning) Policy are a legal umbrella in the development of a region, but these policies are sometimes out of sync when applied in the field, resulting in a gap between spatial planning policies and realization. This study aims to determine the suitability and discrepancy between the Garut Regency RTRW policy and the realization, especially related to the Sukanggang IPK KPI, Garut Kota District. The "policy research" method is used in this study by synchronizing the RTRW policy with conditions in the field and with related laws and regulations combined with an IPA (Importance Performance Analysis) approach to determine the level of the gap between policy and realization. Based on the results of the analysis, the direction of the spatial pattern of the Garut Regency RTRW related to the industrial designation area in the Garut City District has not been based on regulations and laws and conditions in the field, so that there is asynchrony in planning. Likewise, with the direction of the policy on spatial planning with actual conditions in the field, there is a gap of 42 percent. For the spatial planning policy to be effective, the existing RTRW Regional Regulation needs to be reviewed (PK) for further revision based on the relevant laws and regulations as well as actual conditions in the field.

Keywords: spatial planning policy, leather tanning industry, gap